

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT TANGKAP YANG
DILARANG DI WILAYAH LAUT SUMATERA BARAT OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN
(Studi di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat)
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Oleh:

AL MUCHLIS FIZRA ANHAL

1710113011



Pembimbing :

- 1. Nelwitis, S.H., M.H.**
- 2. Riki Afrizal, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2021

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG DI WILAYAH LAUT
SUMATERA BARAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIKANAN**

(Studi di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat)

*(Al Muchlis Fizra Anhal, 1710113011, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 62 Halaman, Tahun 2021)*

ABSTRAK

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dipastikan bahwasanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas untuk menjaga ekosistem laut, melaksanakan pengawasan dan perlindungan laut, dan bertanggung jawab melakukan penegakan hukum kelautan dan perikanan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. *Kedua*, Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Tipologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang terdapat dua faktor yaitu faktor internal kurangnya personil penyidik yang bertugas, sedangkan faktor eksternal antara lain masih rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu memberikan laporan terkait tindak pidana perikanan, keterbatasan waktu masa penahanan tersangka.

Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Perikanan.